



**PUTUSAN**

**Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, Manuru, 06 Mei 1979 (41 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Ulungkura, 30 Desember 1973 (47 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Rata, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Luwuk Banggai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb, tertanggal 03-02-2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1999 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Timur berdasarkan

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 145/07/II/1999 tanggal 29 Januari 1999 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Kediaman Orang Tua Penggugat yang terletak di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Timur Kab. Buton sampai tahun 1999, kemudian pindah dan menetap di perumahan dinas Kesehatan di Desa Lobu, Kecamatan Pagimana sampai tahun 2001, kemudian pindah dan menetap di Perumahan Dinas Kesehatan di Desa Rata Kecamatan Toili Barat Kab. Banggai sampai tahun 2018;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang bernama :

- Anak Kesatu, lahir pada tanggal 29 September 2001;
- Anak Kedua, lahir pada tanggal 17 Agustus 2004;
- Anak Ketiga, lahir pada tanggal 04 September 2009;
- Anak Keempat, lahir pada tanggal 30 Maret 2014;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2015 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat sering marah tanpa sebab Terhadap penggugat.
- Tergugat jarang memberi uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari
- Tergugat selalu melakukan KDRT terhadap Penggugat

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2018, yang disebabkan oleh Tergugat marah dikarenakan Penggugat Menanyakan kenapa Tergugat sering jalan dan berselingkuh dengan wanita lain,

*Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



namun Tergugat langsung memukul wajah serta membanting kepala dan badan Penggugat kedinding rumah sebanyak 3 kali sehingga membuat Penggugat hampir pingsan;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ulungkura, Kecamatan Kabaena Tengah Kabupaten Bombana sedangkan Tergugat tetap tinggal di Perumahan Dinas Kesehatan Kab. Banggai Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun 5 bulan lamanya.

8. Bahwa setelah berpisah selama 1 tahun 5 bulan Penggugat sudah pernah melakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) Terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb



**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat telah hadir sendiri ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama melalui Relaas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 145/07/II/1999, tertanggal 29 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

*Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

**1.-----Saksi Kesatu**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

----- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah bibi dari Saksi;

-- - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Ulukara, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana kemudian terakhir mereka bertempat tinggal di rumah Dinas Kesehatan di Desa Rata Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;

- Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

--- - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

-- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Saksi pernah tinggal dan bersekolah di rumah kediaman mereka;

-- Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah belanja dan Tergugat dituduh berselingkuh;

----- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sekitar 2 kali dengan cara Tergugat memukul punggung Penggugat;

-- Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan September 2018, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

*Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

**2.-----Saksi Kedua**

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan sepupu dengan Penggugat;

--Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Ulukara, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana kemudian terakhir mereka bertempat tinggal di rumah Dinas Kesehatan di Desa Rata Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai;

-Bahwa selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

-----Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2018 sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

-----Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, hanya berdasarkan cerita Penggugat;

--Bahwa mengenai penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah belanja dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;

-----Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul punggung Penggugat, namun melihat bekas pukulannya;

--Bahwa setahu Saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan September 2018, Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

-----Bahwa setelah berpisah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli lagi;

*Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb*





-----Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa

*Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian dalam dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "*antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb





apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhi ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Penggugat (X) dan Saksi II Penggugat (X), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan perselisihan dan pertengkaran. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah pada tanggal 23 Januari 1999 di Kecamatan Kabaena Timur, dahulu masuk ke dalam Kabupaten Buton dan sekarang masuk ke Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara langsung yang memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Sedangkan Saksi II Penggugat mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekitar tahun 2018 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah belanja dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 sampai

*Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



dengan sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat. Permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi II Penggugat yang berupa *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi II Penggugat dapat menguatkan keterangan saksi I Penggugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dikarenakan saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan mengetahui upaya damai di antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan tentang telah upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan berdasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb



yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 23 Januari 1999 di Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2018 yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah belanja dan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
3. Bahwa pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2018 yang diperkirakan telah berjalan sekitar 1 tahun 5 bulan lamanya, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

*Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tiada bantahan dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan, yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) Terhadap Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1441 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag.,**

*Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H dan Ugan Gandaika, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sudarmin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

**Hakim Anggota,**

Ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H**

**Hakim Ketua,**

Ttd

**Muhammad Nasir, S.Ag**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Sudarmin, S.H.I**

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp995.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,-
5.	Biaya Materai	Rp 6.000,-
Jumlah		Rp1.091.000,-
(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)